BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Pariwisata

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Menurut Wahab yaitu pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dan mendapatkan suatu pelayanan secara bergantian diantara orang-orang pada suatu negara itu sendiri ataupun diluar negeri yang mana luar negeri merupakan daerah orang lain atau daerah tetangga. Dalam hal ini tentunya kita ingin melaksanakan pariwisata untuk mencari serta kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda-beda kesenangan (Kurniansah dalam Azizah 2022).

Menurut Spillane pariwisata merupakan suatu perjalanan dengan tujuan mendapatkan suatu kenikmatan, mencari kepuasan, memperbaiki sesuatu, Merelaksasikan tubuh, menikmati olahraga dan istirahat (Kurniansah dalam Azizah 2022). Menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009) merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut ("Peraturan Pemerintah Republik Indosia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025" 2025) yang dimaksud kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Berdasarkan ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009) Kepariwisata bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009) pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kabupaten/kota.

3.2 Wisatawan

Menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009), wisatawan adalah orang – orang yang melakukan kegiatan wisata. Menurut Burgin wisatawan adalah semua orang yang melakukan perjalanan wisata, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi (dalam Sari 2018). Pengertian wisatawan lainnya menurut (Wilantari 2023) yaitu kata wisatawan atau tourist merujuk kepada orang yang menjadi bagian dari traveler atau visitor, sedangkan menurut (Wirawan, Octaviany, *and others* 2022) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sebagai wujud manifestasi dari interaksi sebagai akibat perpindahan orang dari tempat dimana wisatawan biasanya tinggal. Menurut Spillane kunjungan atau perjalanan wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Kurniansah dalam Azizah 2022) yaitu:

1. Faktor motivasi kunjungan setiap manusia, pihak perjalanan dan tipe perjalanan.
2. Geomorfologi tujuan atau faktor fisik lokasi tujuan.

3. Perjalanan sebagai tujuan utama atau tujuan sekunder, pemilihan transportasi.
4. Faktor waktu yaitu lamanya waktu kunjungan di tujuan wisata atau total durasi perjalanan.

3.3 Daya Tarik Wisata dan Daerah Tujuan Wisata

Menurut ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025" 2025) yang dimaksud Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Objek Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

3.4 Sarana Wisata

Menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" 2009) usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler / umum. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, dan alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya.

3.5 Aksesibilitas Pariwisata

Menurut ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun

2010-2025" 2025) pasal 1 angka 9 aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke objek pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah objek pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
2. Penyediaan dan pengembangan prasara transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
3. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

Menurut Spillane layanan transportasi merupakan bagian penting dari sistem pergerakan wisatawan sehingga sarana transportasi jalan sebagai salah satu komponen aksesibilitas pada pergerakan pariwisata perlu dikembangkan sesuai peranannya dalam memberikan kemudahan mobilitas wisatawan yang dinamis (Kurniansah dalam Azizah 2022). Sedangkan menurut (Zaqiatun 2023) salah satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata yaitu aspek aksesibilitas atau kelancaran masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya, perpindahan tersebut bisa dalam jarak dekat, menengah, ataupun jauh sekalipun sehingga diperlukan alat transportasi.

3.6 Angkutan

Angkutan atau transport adalah sarana memindahkan orang dan / barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan tujuan membantu orang atau sekelompok orang untuk meraih berbagai tempat yang dikehendaki dan peranan angkutan sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun pariwisata (Wirasutama, Suthanaya, and Wedagama 1970). Menurut

(Sihombing and Hutagalung 2021) bagi wisatawan, keberadaan transportasi yang memadai tentunya akan memberikan kemudahan menjangkau objek-objek wisata yang ingin dikunjungi terutama kemudahan dalam mengakses angkutan pariwisata.

Dalam ("Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" n.d.) adalah Pasal 1 angka 3 dan ("Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek" n.d.) Pasal 1 angka 1, yang dimaksud Angkutan adalah perpindahan orang dan/ barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum menurut ("Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" n.d.), yaitu terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

3.7 Angkutan Pariwisata

Menurut ("Peraturan Pemerintah Republik Indosia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025" 2025) menjelaskan tentang arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi meliputi peningkatan dan pengembangan akses yang mudah dan peningkatan keamanan dan kenyamanan Bergeraknya menuju objek wisata. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan kapasitas angkutan pariwisata.

Dalam ("Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" n.d.), Pasal 154 (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan pariwisata. (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Dalam ("Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek" 2018), Pasal 1 Nomor 3 yaitu Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Nomor 19, menjelaskan bahwa Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. Pasal 1 Nomor 9 yaitu Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

Menurut (Firmansyah et al. 2017) dalam pembangunan transportasi khususnya angkutan pariwisata, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai peranan masing-masing sesuai cakupan kewenangannya untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengawasi, dan mengendalikan perwujudan sistem transportasi yang selamat, efektif, efisien, dan terpadu.

3.8 Permintaan Angkutan

Permintaan didefinisikan sebagai kuantitas total dari pelayanan atau jasa angkutan tertentu yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen pada harga tertentu pada pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu pula.

Permintaan angkutan didapat dari hasil survey wawancara wisatawan pada lokasi wisata, jenis permintaan angkutan terdiri dari :

1. Permintaan Angkutan Umum Aktual (*Actual Demand*) Permintaan angkutan umum actual merupakan jumlah permintaan wisatawan yang sudah menggunakan angkutan umum. Perhitungan demand actual didapatkan dari menjumlahkan jumlah wisatawan yang berangkat ke lokasi wisata menggunakan moda angkutan.
2. Permintaan Angkutan Umum Potensial (*Potensial Demand*) Permintaan angkutan umum potensial merupakan jumlah permintaan wisatawan yang sudah menggunakan angkutan umum ditambah dengan wisatawan pengguna menggunakan angkutan pribadi yang berkeinginan untuk beralih ke angkutan umum. Perhitungan demand potensial didapatkan dengan menjumlahkan wisatawan yang berangkat ke lokasi menggunakan kendaraan pribadi dan yang bersedia berpindah ke angkutan pariwisata.

3.9 Parameter Kinerja Angkutan Pariwisata

Dalam perhitungan Parameter Kinerja Angkutan, peneliti mengacu kepada ("SK Dirjen 687 Tahun 2002 Ttg Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur" n.d.) menguraikan parameter kinerja angkutan pariwisata terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Waktu Operasi Kendaraan
Waktu operasi adalah waktu yang digunakan kendaraan untuk 23 beroperasi melayani wisatawan dalam satu hari.
2. Kecepatan Rencana
Kecepatan rencana adalah kecepatan rata-rata yang digunakan untuk menempuh perjalanan dalam satuan km/jam.
3. Waktu tempuh
Waktu tempuh adalah perbandingan jarak tempuh dengan kecepatan operasi yang dibutuhkan oleh sebuah kendaraan untuk sampai ke tujuannya.
4. Waktu sirkulasi (RTT)
Waktu sirkulasi angkutan pariwisata adalah waktu perjalanan angkutan pariwisata dari titik asal ke titik tujuan dan kembali lagi ke awal.

5. Km-tempuh rit

Km-tempuh rit adalah jarak yang ditempuh suatu kendaraan dalam satu kali atau dua kali perjalanan (perjalanan bolak balik).

6. *Headway*

Headway adalah selisih waktu keberangkatan atau kedatangan antara kendaraan angkutan dengan kendaraan angkutan dibelakangnya dalam satu rute pada satu titik tertentu.

7. Frekuensi

Frekuensi Kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan yang menjadi rute tersebut dalam kurun tertentu.

8. Kebutuhan Armada

Jumlah armada yang dibutuhkan dalam pengoperasian angkutan pariwisata.

3.10 Penentuan Jenis Armada

Penentuan kendaraan yang digunakan untuk angkutan pariwisata di Kabupaten Pacitan akan disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Penentuan jenis kendaraan dipengaruhi oleh jumlah penumpang angkutan pariwisata selama suatu perjalanan, yang menentukan jenis kendaraan berdasarkan kapasitasnya. Selain itu, dalam menentukan jenis kendaraan yang akan dioperasikan juga harus memperhatikan kapasitas infrastruktur jalan yang akan digunakan, dimana setiap ruas mempunyai ukuran dan tonase yang dapat dilalui kendaraan angkutan pariwisata. Ketentuan tersebut tertuang dalam ("Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan" 2012) dan (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018) Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

3.11 Penjadwalan

Penjadwalan merupakan salah satu proses perencanaan operasional yang berkaitan dengan kegiatan yang melayani wisatawan secara cepat dan

efisien mulai dari pemberangkatan hingga tujuan. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan penjadwalan antara lain:

1. (*Travel Time*) Waktu Perjalanan
2. (*Round Trip Time*) Waktu Pulang Pergi
3. (*Headway*) Waktu Antara Kendaraan
4. *Frekuensi*
5. Jumlah Armada

3.12 Biaya Operasional Kendaraan

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah perkotaan, biaya pokok dan biaya tidak langsung.

3.13 Tarif

Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum yang di nyatakan dalam rupiah. Tarif yang diperhitungkan agar pihak operator memperoleh keuntungan 10% dari biaya operasi kendaraan.